

ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM KERANGKA HUKUM PIDANA INDONESIA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Riyanto 2310622013, Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) akhirnya disahkan sebagai pengganti KUHP lama atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dalam KUHP baru juga terdapat beberapa pasal yang sempat mendapat pro dan kontra didalam masyarakat salah satunya terkait dimasukkannya Pasal Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat). Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa secara seksama tentang bagaimana peran hukum adat dalam spesifik hukum pidana setelah dimasukkannya kedalam KUHP baru sehingga kita dapat mengetahui tentang kedudukannya sebagai hukum yang dahulu dikenal sebagai hukum tidak tertulis menjadi hukum tertulis. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan juga Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Hasil penelitian yang sudah penulis dapatkan bahwa Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) dalam spesifik hukum pidana dalam KUHP baru akan dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana ketentuan tersebut sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) dan peneliti juga memberikan konsep penerapan Hukum yang hidup dalam masyarakat (Hukum Adat) dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan dari negara terkait proses penegakan hukum pidana adat.

Kata Kunci: Pidana, Adat, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF LIVING LAW IN THE SCOPE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW AFTER THE ENACTMENT OF LAW NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE

Riyanto 2310622013, Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa

Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) was finally passed as a substitute for the old Criminal Code or Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations, in the new Criminal Code there are also several articles that have received pros and cons in the community, one of which is related to the inclusion of articles on laws that live in society (Customary Law). The purpose of this study is to examine and analyse carefully about how the role of customary law in the specifics of criminal law after its inclusion in the new Criminal Code so that we can find out about its position as a law that was once known as unwritten law into written law. The legal research method used is normative juridical legal research method by conducting research on library materials and using statute approach, conceptual approach, case approach and historical approach. The results of the research that the author has obtained that the Law that lives in the community (Customary Law) in the specific criminal law in the new Criminal Code will be made a Government Regulation (PP) as the implementation of the regulation so that it can be used as a guideline for the Regional Government in making Regional Regulations (PERDA) on the Law that lives in the community (Customary Law) and researchers also provide the concept of applying the Law that lives in the community (Customary Law) with the approach of the principle of restorative justice for law enforcement officials in carrying out their duties as representatives of the state related to the process of enforcing customary criminal law.

Keywords: Criminal, Customary, Restorative Justice.